

Strategi Revolusi Hijau untuk Pembangunan Perdesaan Desa Terdampak Bonus
Demografi di Era Industri 4.0
(Kasus Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah)
Florentina Ratih Wulandari (wulandari@ecampus.ut.ac.id),
Hanif Nurcholis (hanif@ecampus.ut.ac.id)
Universitas Terbuka

Abstrak

Artikel ini sebagai wacana, bertujuan membahas revolusi hijau sebagai strategi pembangunan perdesaan di era industri 4.0 sejak implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka, dan hasilnya dianalisis dengan teori strategi pembangunan desa menurut Griffin (1999). Hasil kajian menemukan di Indonesia, khususnya Kabupaten Wonogiri, menghadapi kecenderungan masalah menurunnya jumlah dan preferensi anak muda produktif yang bekerja bidang pertanian, serta peningkatan jumlah lansia selama tahun 2013 – 2017. Untuk itu, perlu mempertimbangkan strategi revolusi hijau agar pembangunan perdesaan terdampak bonus demografi, dapat berkelanjutan secara optimal. Keterbatasan wacana ini perlu ditindaklanjuti dengan penelitian lapangan. Orijinalitas wacana ini pada revolusi hijau sebagai strategi pembangunan desa terkait implikasi bonus demografi. Implikasi praktis wacana ini yakni rekomendasi strategi revolusi hijau sebagai strategi radikal dalam pembangunan perdesaan sehingga tumbuh produk pertanian yang bernilai tambah dan kompetitif sesuai dengan tuntutan era industri 4.0.

Kata kunci: strategi pembangunan desa, revolusi hijau, redistributif

Pendahuluan

Pembangunan Desa bagian dari pembangunan regional dan daerah, yang merujuk pada kebijakan pembangunan nasional. Pada periode pemerintahan nasional saat ini, implementasi pembangunan desa diarahkan untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa-desa dalam kerangka NKRI, sesuai visi misi Nawacita yang ke 3 (tiga) pemerintahan nasional. Pada hakikatnya, tujuan pembangunan desa diharapkan mampu mengatasi berbagai masalah kehidupan masyarakat desa. Dengan demikian indikator keberhasilannya dapat dilihat dari sejauh mana masalah-masalah di desa dapat teratasi secara struktural dan sistematis, misalnya, menurunnya jumlah penduduk miskin, adanya perbaikan sarana dan prasarana sosial ekonomi, penguatan lembaga-lembaga desa, serta lainnya. Sejak diimplementasikan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka

Desa memiliki kewenangan pembangunan Desa sekaligus pengelolaan dana desa yang Pemerintah Pusat. Salah satu esensi dari diberikannya bantuan dana Desa, untuk menumbuhkan kapabilitas swakelola Desa dengan menggunakan potensi Desa dengan bahan baku lokal yang ada, tenaga kerja Desa setempat seluruh Desa dan tentunya pelibatan masyarakat Desa secara aktif dalam seluruh rangkaian pengelolaan dana Desa secara transparan, akuntabel dan bertanggung jawab sesuai kebutuhan Desa. Hal ini menunjukkan seluruh Desa berupaya mengelola dana desa secara masif.

Data Kemenkeu (2017:20) menyebutkan peningkatan kinerja penyaluran dan penyerapan dana desa rentang tahun 2015 dan tahun 2016. Berikut rincian data tersebut (lihat Tabel 1. Penyaluran dan Penyerapan Dana Desa Tahun 2015- Tahun 2016).

Tabel 1. Penyaluran dan Penyerapan Dana Desa
Tahun 2015- Tahun 2016

Tahun	Penyaluran dan Penyerapan Dana Desa							
	Pem-bangunan Desa (trilyun rupiah)	%	Pem-berdaya-an Masya-rakat (trilyun rupiah)	%	Penyeleng- garaan Pemerintah-an (trilyun rupiah)	%	Pembinaan Kemasyara-katan (trilyun rupiah)	%
2015	14,25	82,21	1,37	7,7	1,13	6,55	0,61	3,51
2016	40,54	87,7	3,17	6,8	1,68	3,6	0,84	1,8

Sumber: “Buku Pintar Dana Desa : Dana Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat”,
Kemenkeu (2017:20)

Jika dianalisis, data tersebut menunjukkan bahwa peruntukan dana desa untuk pembangunan meningkat dari tahun 2015 – tahun 2016 sebesar Rp. 26,29 T (48%).

Keberhasilan tersebut, menunjukkan peningkatan pertumbuhan regional secara signifikan, tetapi belum menjawab pemerataan hasil-hasil pembangunan desa yang secara seimbang dan berkelanjutan. Hal ini ditunjukkan adanya 122 kabupaten daerah tertinggal yang ada di Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015. Prediksi potensi masalah ini sudah terlihat dari hasil studi Direktorat Pengembangan Wilayah Bappenas tahun 2009, tentang kinerja pembangunan Daerah Otonom Baru (DOB), yang mana studi ini mengkonfirmasi kebijakan pemekaran memang belum memberikan akselerasi pembangunan yang signifikan dibandingkan daerah lain yang tidak mekar. (diunduh dari [https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-1153740/pemprov-perlu-](https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-1153740/pemprov-perlu-terapkan-reformasi-birokrasi)

[terapkan-reformasi-birokrasi](https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-1153740/pemprov-perlu-terapkan-reformasi-birokrasi) pada hari 18 Mei 2019 pukul 22.32 WIB). Bahkan, berikutnya pada tahun 2019, masih ditemukan ada 8 kabupaten daerah tertinggal sehingga masuk daerah sasaran intervensi kebijakan pengembangan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades) Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertinggal (Ditjen PDT) dan Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu (Ditjen PDTu) yaitu Kabupaten Alor, Rote Ndao, Timor Tengah Utara, Sabu Raijua, Maluku Tenggara Barat, Kepulauan Aru, Pulau Morotai, dan Kabupaten Supiori, serta masih ada 40 kawasan transmigrasi berkategori daerah tertinggal. (diunduh dari <https://www.kemendes.go.id/view-detil/2704/sinergitas-percepatan-pembangunan-daerah-tertinggal> pada hari 18 Mei 2019 pukul 22.18 WIB). Hal ini sebagai contoh masih adanya daerah tertinggal yang belum tersentuh secara nyata hasil-hasil (kebijakan) pemerataan pembangunan.

Di sisi lain, dibalik keberhasilan tersebut ternyata ada berbagai masalah untuk capaian tujuan pembangunan desa. Salah satunya, ternyata kinerja penyaluran dan penyerapan dana desa belum dapat menjawab tuntas capaian marwah pemerataan pembangunan yang seimbang dan berkelanjutan secara paripurna. Hal ini cenderung dihadapi oleh berbagai perdesaan di Indonesia yang menghadapi potensi masalah kurangnya tenaga kerja produktif setempat untuk pengelolaan mata pencaharian utama bidang pertanian akibat menurunnya jumlah penduduk produktif muda dan meningkatnya jumlah penduduk lansia¹. Provinsi Jawa Tengah sebagai pulau di Indonesia yang kepadatannya terbesar, juga menghadapi masalah ini.² Bahkan jumlah penduduk lansia di Jawa Tengah (12,6%) termasuk kategori tiga terbesar di Indonesia, selain Yogyakarta dan Jawa Timur. Data BPS tahun 2010-2017 (LBDSE BPS,2018:173), menunjukkan laju pertumbuhan penduduk di antara 34 provinsi di Indonesia, ada 2 provinsi yang laju pertumbuhan penduduknya dibawah 1% yakni Provinsi Tengah sebesar 0,78% dan Provinsi Jawa Timur

¹ Lansia adalah seseorang yang sudah mencapai usia 60 tahun. Lansia potensial artinya penduduk lansia yang masih mampu bekerja atau menghasilkan barang dan jasa, demikian sebaliknya untuk penduduk lansia tidak potensial (Undang-Undang No. 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia).

² Pada tahun 2017, data BPS (LBDSE,2018:171) menunjukkan di wilayah Indonesia, pulau yang kepadatan penduduknya tertinggi adalah pulau Jawa, sebesar 1.145 per km² dengan jumlah penduduk 34.257.870 jiwa. Provinsi Jawa Tengah memiliki 8559 desa, 29 kabupaten dan 6 kota serta 573 kecamatan (BPS Jawa Tengah, 2018:21).

sebesar 0,64%. Hal tersebut, jika disandingkan dengan rasio ketergantungan, penduduk lansia dan umur harapan hidup, maka diantara kedua provinsi, maka provinsi yang cenderung lebih memiliki masalah kontraproduktif bonus demografi bagi keberlanjutan produktifitas sektor pertanian dan ketahanan pangan dari sektor pertanian, adalah Jawa Tengah dibandingkan Jawa Timur.³

Provinsi Jawa Tengah dinisbatkan sebagai salah satu daerah penyangga pangan nasional (BPS Jawa Tengah, 2018:184). Ada masalah yang membayangi citra tersebut, salah satunya masalah semakin mengemukanya kecenderungan berkurangnya jumlah luas panen, rata-rata produksi dan produksi tanaman padi sawah di Provinsi Jawa Tengah dalam rentang tahun 2010 - tahun 2014, terkecuali pada tahun 2013, dan produktivitas pada tahun 2012 yang meningkat tetapi cenderung turun kembali pada tahun 2013-2014. Hal ini kebalikan dengan tanaman padi ladang (lihat tabel 7 Luas Panen, Produksi, Produktivitas Padi Sawah dan Padi Ladang Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014

³ Hal ditunjukkan dengan data LBDSE BPS tahun 2018 (2018:173), yakni rasio ketergantungan Provinsi Jawa Tengah sebesar 47,7 sedangkan Provinsi Jawa Timur sebesar 45,9. Dari perbandingan persentase penduduk lansia dari total jumlah penduduk, menunjukkan Provinsi Jawa Tengah sebesar 12,6% sedangkan Provinsi Jawa Timur sebesar 5,8% dan dari aspek umur harapan hidup, maka rerata umur harapan hidup di Provinsi Jawa Tengah sebesar 73,9 tahun sedangkan Provinsi Jawa Timur sebesar 70,9 tahun.

Tabel 7 Luas Panen, Produksi, Produktivitas Padi Sawah dan Padi Ladang di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014

Tahun	Padi Sawah			Padi Ladang		
	Luas panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ku/Ha)	Luas panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ku/Ha)
2014	1 717 270	9294 474,72	54,12	83 638	353629,72	42,28
2013	1 765 240	10007 562,40	56,69	80 207	337254,01	42,05
2012	1 698 804	9911 951,24	58,35	74 754	320983,16	42,94
2011	1 662 277	9149 204,17	55,04	61 969	242755,04	39,17
2010	1 734 647	9859 955,71	56,84	66 750	250874,78	37,58

Sumber: disarikan dari data BPS Jawa Tengah Tahun 2018 (Luas Panen, Produksi, Produktivitas Padi Sawah dan Padi Ladang Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014, BPS Jawa Tengah 2018)

Di Provinsi Jawa Tengah ada beberapa daerah kabupaten dan 1 (satu) kota yang pada rentang tahun 2010 – tahun 2017 laju pertumbuhan penduduknya stagnan rendah yakni Magelang, Purworejo, Kebumen, Wonogiri, Pemalang, dan Tegal. Penurunan laju pertumbuhan penduduk juga kembali signifikan terjadi pada ke-empat urutan belakang daerah tersebut pada tahun 2016-2017, menjadi 0,30%.⁴ Kondisi tersebut menunjukkan keberhasilan

⁴ Tahun 2010 – tahun 2017 laju pertumbuhan penduduk Provinsi Jawa Tengah stagnan rendah < 0,4% yakni berkisar pada 0,36%-0,37% bahkan pada tahun 2016-2017 terjadi penurunan laju pertumbuhan penduduknya yakni menjadi 0,30% dan 0,28%. (“Provinsi Jawa Tengah dalam Angka”, BPS Jawa Tengah, 2018:53)

pengendalian jumlah penduduk (program Keluarga Berencana) tetapi daerah-daerah tersebut juga menghadapi potensi masalah kurangnya tenaga kerja produktif setempat untuk pengelolaan mata pencaharian utama bidang pertanian akibat menurunnya jumlah penduduk produktif muda dan meningkatnya jumlah penduduk lansia⁵. Di sisi lain, pada beberapa tahun terakhir ada kecenderungan berkurangnya preferensi angkatan muda produktif untuk bekerja bidang pertanian, dengan berbagai latarbelakang, antara lain: banyaknya pilihan

⁵ Lansia adalah seseorang yang sudah mencapai usia 60 tahun. (Undang-Undang No. 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia).

Florentina Ratih Wulandari; Hanif Nurcholis

pekerjaan formal dan informal yang lebih menjanjikan hasilnya, lebih menantang kemampuan tenaga kerja produktif dan tumbuhnya industri-industri baru di wilayah *sub-urban* dan atau perdesaan, serta penyebab lainnya. Kabupaten Wonogiri adalah salah satu contoh wilayah di Provinsi Jawa Tengah dengan kondisi kontraproduktif bonus demografi di atas. Seperti wilayah atasannya (Provinsi Jawa Tengah), Kabupaten Wonogiri juga mempunyai masalah berkurangnya jumlah luas panen, rata-rata produksi dan produksi tanaman padi pada tahun 2013 - tahun 2014 (lihat Tabel 3. Luas

Panen, Rata-Rata Produksi dan Produksi Tanaman Padi per Kecamatan di Kabupaten Wonogiri Tahun 2014). Data BPS Wonogiri (2018) tersebut, mencatat tahun 2014, luas panen padi sawah sebanyak 57.131 Ha., rata-rata produksi sebesar 57.07 Kw/Ha., dan jumlah produksi sebesar 3.260.550 Kw, yangmana hasil tersebut termasuk untuk jenis padi gogo, menurun dibandingkan dengan hasil tahun 2013, dimana luas panen padi sawah sejumlah 56.144 Ha., rata-rata produksi sebesar 59,13 Kw/Ha., dan jumlah produksi sebesar 3.319.900 Kw.

Tabel 3. Luas Panen, Rata-Rata Produksi , dan Produksi Tanaman Padi Menurut Kecamatan di Kabupaten Wonogiri Tahun 2014

Kecamatan	Padi Sawah			Padi Gogo		
	Luas Panen	Rata-Rata	Produksi	Luas Panen	Rata-Rata	Produksi
1. Pracimantoro	1.164	54.36	63.280	3.789	40.94	155.120
2. Paranggupito	0	0	0	2.138	44.59	95.330
3. Giritontro	357	53.50	19.100	1.520	38.64	58.740
4. Giriwoyo	2.544	59.67	151.800	3.161	46.82	148.000
5. Batuwarno	811	57.84	46.910	1.079	44.49	48.000
6. Karangtengah	1.632	53.38	87.120	1.072	44.28	47.470
7. Tirtomoyo	3.767	58.32	219.690	200	44.75	8.950
8. Nguntoronadi	1.588	53.32	84.670	780	40.22	31.370
9. Baturetno	2.288	58.51	133.880	15	45.33	680
10. Eromoko	3.722	59.38	221.010	1.955	44.49	86.980
11. Wuryantoro	2.075	59.28	123.000	280	45.00	12.600
12. Manyaran	2.353	57.93	136.300	597	42.71	25.500
13. Selogiri	4.148	59.75	247.830	0	0	0
14. Wonogiri	1.840	56.83	104.560	200	43.00	8.600
15. Ngadirojo	5.358	57.93	310.390	27	33.70	910
16. Sidoharjo	2.897	57.19	165.670	285	44.21	12.600
17. Jatiroto	1.569	56.93	89.330	0	0	0
18. Kismantoro	1.418	55.28	78.390	323	41.21	13.310
19. Purwantoro	2.621	56.81	148.900	15	40.67	610

20. Bulukerto	1.974	50.79	100.250	0	0	0
21. Puhpelem	1.062	56.33	59.820	100	41.60	4.160
22. Slogohimo	3.383	53.23	180.070	0	0	0
23. Jatisrono	3.250	56.10	182.310	0	0	0
24. Jatipurno	1.589	58.96	93.690	0	0	0
25. Girimarto	3.721	57.13	212.580	0	0	0
Jumlah 2014	57.131	57.07	3.260.550	17.536	43.28	758.930
Jumlah 2013	56.144	59,13	3.319.900	17.735	44,41	787.680
Jumlah 2012	55.168	58,54	3.229.540	15.909	47,07	748.900
Jumlah 2011	54.185	55.58	3.011.350	14.560	44.87	653.340
Jumlah 2010	49.876	58,19	2.902.305	13.299	44,13	586.892

Sumber : Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kabupaten Wonogiri

Keterangan :

Luas Panen = Ha

Rata-rata = Kw/Ha

Produksi = Kw

Diangkatnya contoh kasus strategi pembangunan perdesaan Kabupaten Wonogiri, selain masalah-masalah di atas juga disebabkan gini ratio Kabupaten Wonogiri yang masih kecil dalam kurun 10 tahun (tahun 2005 – tahun 2015) yang hanya meningkat sebesar 0,05, yakni dari angka 0,26 tahun 2005 dan ke angka 0,31 tahun 2015⁶. Hal ini menunjukkan bahwa masih terjadi peningkatan ketimpangan distribusi pendapatan di perdesaan Kabupaten Wonogiri (BPS Kabupaten Wonogiri, 2018).

⁶ Mustopadidjaja (1996) menyatakan bahwa secara makro salah satu indikator yang digunakan untuk menggambarkan tingkat pemerataan pendapatan adalah Gini Rasio atau Koefisien Gini (KG) dimana apabila semakin kecil KG, maka akan semakin baik distribusi pendapatan dalam masyarakat, pun sebaliknya, semakin besar angka KG, maka akan semakin timpang distribusi pendapatan dalam masyarakat.

Rumusan Masalah

Dari data-data statistik di atas, maka Kabupaten Wonogiri menjadi salah satu contoh wilayah di Jawa Tengah yang menghadapi potensi masalah menurunnya daya produktifitas sektor pertanian sebagai matapecaharian pokok akibat menurunnya jumlah dan preferensi kerja tenaga kerja usia produktif dan meningkatnya angka ketergantungan penduduk non produktif terutama dari golongan lansia.

Hal tersebut menggarisbawahi perlunya strategi pembangunan perdesaan berkelanjutan bagi Kabupaten Wonogiri, sebagai salah satu contoh wilayah Indonesia pada umumnya. Jika mengamati situasi dan kondisi yang terjadi dengan masalah-masalah di atas maka wacana strategi revolusi hijau yang dikemukakan oleh

Griffin (1999) sebagai strategi pembangunan perdesaan, menjadi alternatif yang perlu dipertimbangkan. Oleh sebab itu, permasalahan yang diangkat dalam artikel ini, adalah signifikansi revolusi hijau sebagai strategi pembangunan perdesaan dalam menghadapi kondisi kontraproduktif dampak bonus demografi di era revolusi industri 4.0.

Metode Penelitian

Wacana ini dibangun dengan menggunakan metode studi kepustakaan. Data-data pembangunan desa diperoleh dari berbagai data BPS, Kemenkeu RI dan lainnya. Kajian teori diperoleh dari teori strategi pembangunan desa yang dikemukakan Griffin (1999).

Pembahasan

A. Implikasi Bonus Demografi untuk Pembangunan Desa di Kabupaten Wonogiri

Proyeksi bonus demografi di Indonesia ditandai dengan peningkatan pesat laju pertumbuhan penduduk usia produktif dan ledakan jumlah penduduk usia produktif secara signifikan. BKKBN (2018) menyiarkan adanya bonus demografi di Indonesia disebabkan oleh faktor keberhasilan program Keluarga Berencana

(KB).⁷ Hal tersebut berdampak pada adanya perubahan struktur umur penduduk yang ditandai dengan menurunnya rasio ketergantungan (*dependency ratio*) penduduk non-usia kerja (0-14 tahun dan diatas 65 tahun) terhadap penduduk usia kerja (15-64 tahun). (diunduh dari <https://www.bkkbn.go.id/detailpost/bonus-demografi-meningkatkan-kualitas-penduduk-melalui-keluarga> diunduh pada Kamis, 28 Februari 2019 pukul 10.52 WIB). Implikasi positif bonus demografi berupa besarnya potensi penduduk produktif dibanding penduduk usia non produktif. Implikasi negatif bonus demografi adalah kebutuhan pengembangan kapabilitas penduduk usia produktif beserta infrastruktur pembangunan sumber daya manusia dan sosial ekonomi yang mendukungnya. Diperkirakan bonus demografi akan mencapai puncaknya tahun 2025 -2030 dengan laju pertumbuhan penduduk dalam rentang waktu 7 (tujuh) tahun dari tahun 2010 – tahun 2017 yakni 1,34. Laju pertumbuhan tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dekade sebelumnya, antara lain:

⁷ Hasil proyeksi penduduk Indonesia tahun 2017 adalah 261.890.900 jiwa (LBDSE BPS Desember 2018 Edisi 103, 2018:167). Piramida penduduk Indonesia tahun 2017 berbentuk seperti stupa, sebagai gambaran Indonesia sudah memasuki era bonus demografi, dimana jumlah penduduk usia muda lebih besar dibanding usia belum produktif (0-14 tahun) dan lansia (> 64 tahun), dengan rasio ketergantungan 48,1. Hal ini berarti setiap 100 penduduk produktif Indonesia menanggung 48-49 penduduk usia non produktif (LBDSE BPS 2018, 2018:167-168).

tahun 1971-1980 yakni 2,34% yang telah menimbulkan *baby booming* tahun 70-an, dan tahun 2000 – tahun 2010 sebesar 1,49% (LBDSE BPS, 2018:169).

Implikasi negatif dari bonus demografi bagi Kabupaten Wonogiri dapat dilihat dari data Tabel 1 Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2013; Tabel 2 Penduduk Menurut Kelompok Umur tahun Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2017 dan Tabel 3. Luas Panen, Rata-Rata Produksi dan Produksi Tanaman Padi Per Kecamatan di Kabupaten Wonogiri Tahun 2014. Dari ketiga data tersebut, menunjukkan bahwa besarnya jumlah usia produktif dari usia 15 tahun – 64 tahun di Kabupaten Wonogiri, dari tahun 2013 – tahun 2017, tetapi mengalami penurunan jumlah penduduk tidak produktif usia 0-14 tahun dan usia produktif 15 tahun - 59 tahun tetapi meningkat untuk jumlah penduduk lansia (≥ 60 tahun). Demikian pula total produksi padi, baik padi sawah maupun padi gogo, menunjukkan penurunan jumlah dari 3.260.550 Kw., tahun 2013 ke 3.319.900 Kw., tahun 2014 (perhatikan Tabel 3. Luas Panen, Rata-Rata Produksi dan Produksi Tanaman Padi Per Kecamatan di Kabupaten Wonogiri Tahun 2014) walaupun

luas panen meningkat.⁸ Hal tersebut menunjukkan berbagai kemungkinan penyebabnya, baik karena bencana atau gagal panen, atau keterbatasan alat pemroses hasil panen padi, dan ada kecenderungan kemungkinan menurunnya jumlah tenaga kerja produktif yang mengelola sawah, berubahnya preferensi jumlah tenaga kerja usia produktif terhadap pilihan pekerjaan lain selain pertanian, karena, terutama tumbuhnya industri sekitar wilayah perdesaan atau *sub-urban* yang menarik minat tenaga kerja usia produktif tersebut, atau faktor lainnya.

Data BPS Kabupaten Wonogiri (2018) menunjukkan bahwa total jumlah penduduk usia tidak produktif 0 tahun -14 tahun dan usia produktif 15 tahun- 59 tahun pada tahun 2013, masing-masing sebesar 199.726 jiwa dan 572.157 jiwa lebih besar dibandingkan tahun 2017, masing-masing sebesar 190.919 jiwa dan 570.579 jiwa. Data tersebut menunjukkan adanya penurunan jumlah penduduk usia non produktif dan usia produktif dalam rentang waktu tersebut, dan ada penurunan jumlah generasi usia non produktif. Padahal penduduk usia non produktif diprediksi di masa ke

⁸ Data BPS Kabupaten Wonogiri (2018), mencatat tahun 2014, luas panen padi sawah sebesar 57.131 Ha dan tahun 2013 luas panen padi sawah sebesar 56.144 Ha

Florentina Ratih Wulandari; Hanif Nurcholis

depannya akan naik posisi ke kategori usia produktif. Masalah demografi lainnya adalah semakin meningkatnya jumlah lansia, sehingga rasio ketergantungan lansia terhadap usia produktif diproyeksikan akan semakin meningkat. Oleh sebab itu, strategi revolusi hijau dapat dipertimbangkan sebagai salah satu alternatif untuk pembangunan perdesaan yang berkelanjutan dan humanis.

B. Wacana dan Signifikansi Strategi

Pembangunan Desa Revolusi Hijau Kabupaten Wonogiri dan Perdesaan di Indonesia

Secara umum, pembangunan perdesaan muncul untuk memberikan solusi paripurna dari masalah-masalah, semisal tingginya angka kemiskinan, terbatasnya lapangan pekerjaan yang dapat diakses dengan persyaratan yang sesuai, terbatasnya sarana dan prasarana layanan publik, meningkatnya pengangguran dan setengah pengangguran di lingkungan perdesaan pada penduduk usia produktif. Demikian pula di Kabupaten Wonogiri, sehingga Pemerintah Kabupaten (PemKab) Wonogiri sejak tahun 2016 telah melakukan berbagai solusi masalah-masalah masyarakat perdesaan di wilayahnya. Visi Pemerintah Kabupaten Wonogiri adalah Membangun Wonogiri SUKSES, Beriman,

Berbudaya, Berkeadilan, Berdaya Saing dan Demokratis.⁹ Visi tersebut dijabarkan ke dalam misi Kabupaten Wonogiri. Dari misi Kabupaten Wonogiri tersebut dijabarkan ke dalam agenda program kerja unggulan yang terdiri dari 10 agenda.¹⁰ Beberapa langkah PemKab Wonogiri yang sudah dilakukan (diunduh dari <http://dishub.wonogirikab.go.id/berita/detail/satu-tahun-pemerintahan-bupati-wonogiri-joko-sutopo>, Kamis 28 Februari 2019 pukul 12.31 WIB), antara lain:

1. Pembangunan bidang infrastruktur khususnya peningkatan jalan dan jembatan rusak dan memprihatinkan sepanjang 323,694 km di tahun 2016, dari 1.038 km ruas jalan kabupaten

⁹ Dikutip dari laman <http://wonogirikab.go.id>, visi tersebut diuraikan sebagai berikut: S dari Stabilitas iklim yang kondusif di pemerintahan dan di masyarakat; U dari Undang-undang artinya komitmen melaksanakan peraturan Per-Undang-undangan; K dari Koordinasi, artinya jalinan koordinasi kepada perangkat daerah dan masyarakat; S dari Sasaran, artinya perencanaan harus jelas dan tepat sasaran; E dari Evaluasi; artinya evaluasi setiap kegiatan dan program untuk peningkatan kualitas - kuantitas program; S dari Semangat Juang membangun Wonogiri dan lainnya (diunduh dari http://wonogirikab.go.id/web/kontent/9/visi_misi pada Kamis 28 Februari 2019 pukul 23.26 WIB)

¹⁰ Agenda Program Kerja Unggulan Pemerintah Kabupaten Wonogiri, antara lain: percepatan pembangunan sarana mobilitas ekonomi masyarakat, infrastruktur jalan dan jembatan serta perbaikan fasilitas umum; subsidi dan bantuan sarana produksi pertanian bagi petani/ kelompok tani serta membangun infrastruktur pertanian untuk menyokong hasil produksi pertanian, dan lainnya. (diunduh dari http://wonogirikab.go.id/web/kontent/9/visi_misi pada Kamis 28 Februari 2019 pukul 23.54 WIB)

- yang menjadi tanggung jawab PemKab Wonogiri
2. pembangunan infrastruktur sosial ekonomi dalam rangka penguatan ekonomi kerakyatan, contohnya revitalisasi pasar tradisional di Kabupaten Wonogiri
 3. pemberian beasiswa bagi 166 mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu dan dilanjutkan penerapan pendidikan dasar gratis yang akan diwujudkan mulai tahun anggaran 2018 serta pemberian dana insentif bagi Guru, dan lain-lain.

Demikian beberapa contoh upaya PemKab Wonogiri dalam melaksanakan pembangunan perdesaan di wilayahnya. Namun, hal tersebut masih belum menjawab secara optimal untuk strategi pembangunan desa yang berkelanjutan dan tangguh dalam menghadapi implikasi negatif dari bonus demografi, terutama antisipasi dan penanganan masalah belum stabilnya ketersediaan populasi usia produktif di bidang pekerjaan pertanian dan belum optimalnya kesiapan dalam menghadapi era revolusi industri 4.0.

Kondisi tersebut ditambah adanya masalah belum kuatnya kapabilitas tenaga kerja produktif (terutama pada sektor pertanian). Hal ini dapat

dilihat dari segi pendidikan terakhir yang ditamatkan, data BPS Kabupaten Wonogiri (2018) dari tahun 2013 – tahun 2014 menunjukkan belum banyaknya penduduk yang menamatkan pendidikan di SMP/ Sederajat, SMA/ sederajat, apalagi level perguruan tinggi. Pada tahun 2013 dan tahun 2014 persentase jumlah penduduk yang menamatkan pendidikan SD/ sederajat adalah terbesar dibandingkan kategori tamatan pendidikan lainnya. Persentase tamatan SD/ sederajat di Kabupaten Wonogiri tahun 2013 adalah 35,22% dan tahun 2014 yakni 34,1%. Kondisi ini memunculkan potensi masalah kuantitas dan belum optimalnya kapabilitas sumber daya manusia usia produktif dalam pembangunan perdesaan termasuk kesulitan pengelolaan pertanian yang masih menjadi mata pencaharian utama di Kabupaten Wonogiri sejak saat ini sampai ke depannya. Dalam pengelolaan pertanian di era industry 4.0, kapabilitas sumber daya manusia menjadi kebutuhan untuk berjalannya pembangunan perdesaan berkelanjutan yang tangguh dan berdayasaing dalam perubahan lingkungan yang dinamis.¹¹ Tantangan tersebut akan dihadapi oleh Kabupaten Wonogiri dan kemungkinan

¹¹ Dalam paradigma *dynamic governance* yang dikemukakan oleh Neo dan Chen (2007:13), *able people* sebagai individu yang berkemampuan dan *agile processes* sebagai proses mumpuni dalam sistem yang berjalan.

wilayah perdesaan lainnya di Indonesia, terlebih kondisi sumber daya manusia usia produktif yang terkendala belum banyaknya jumlah tamatan tingkat perguruan tinggi yang cenderung melek teknologi dan melek literasi.

Karakteristik dan potensi di atas menjadi dasar rujukan pilihan strategi pembangunan perdesaan di Kabupaten Wonogiri dan wilayah perdesaan lainnya di Indonesia. Griffin (1999:25) menyatakan strategi pembangunan tersebut dapat diklasifikasikan dalam 3 kriteria:

1. *...The strategies refer to development in the round, to overall development, and not just to one aspect of development or to one sector...*
2. *...The strategies can readily be formulated in a way that makes them amenable to empirical testing, to measurement and quantification of at least some of the central variables...*
3. *... The strategies correspond closely to formulations familiar to and often employed by policymakers in both the Third World and the OECD countries..."*

Dari ketiga kriteria tersebut, maka muncul 6 strategi pembangunan ekonomi, yang dapat digunakan untuk strategi pembangunan perdesaan. Griffin (1999:26-31) mengemukakan ada 6 strategi pembangunan desa yaitu: (1) strategi moneter (*monetarist strategies of development*), (2) strategi pembangunan berwawasan luar atau ekonomi terbuka (*open economy strategies of development*), (3) strategi pembangunan industrialisasi (*industrialization strategies of development*), (4) strategi pembangunan revolusi hijau (*the green revolution strategy*), (5) strategi pembangunan redistributif (*redistributive strategies of development*) dan (6) strategi pembangunan sosialis (*socialist strategies of development*).

Dari penjabaran Griffin (1999) maka strategi pembangunan perdesaan yang cenderung mengatasi karakteristik kondisi dan masalah-masalah, serta menghargai potensi kekayaan alam Kabupaten Wonogiri khususnya dan kawasan perdesaan di Indonesia pada umumnya adalah strategi pembangunan revolusi hijau (*the green revolution strategy*).

Adanya peningkatan angka gini ratio di Kabupaten Wonogiri, merupakan sinyal peringatan bagi pemerintah Kabupaten Wonogiri, mencari solusi untuk meminimalisasi ketimpangan pemerataan pendapatan. Oleh sebab itu Kabupaten Wonogiri perlu

mempertimbangkan strategi revolusi hijau secara komprehensif.

Strategi pembangunan revolusi hijau menekankan pada strategi pertumbuhan sektor pertanian. Tujuan dari strategi revolusi hijau Griffin (1999:30), antara lain: (1) untuk meningkatkan ketahanan pangan dan hasil usaha pertanian. Tersedianya pasokan pangan yang melimpah akan menurunkan harga relatif makanan sehingga dapat menurunkan biaya unit tenaga kerja. Rendahnya biaya unit akan menaikkan keuntungan dalam kegiatan non-pertanian sehingga secara keseluruhan memungkinkan adanya penghematan yang lebih tinggi, investasi lebih banyak dan tingkat pertumbuhan yang lebih cepat. Kabupaten Wonogiri dengan menurunnya jumlah usia produktif yang bekerja pada lapangan kerja utama pertanian, perlu mengantisipasi stabilitas ketahanan pangan dan hasil usaha pertanian yang menyejahterakan masyarakat petani secara berkesinambungan. (2) untuk membantu langsung industri yang berlokasi di daerah pedesaan, dengan menyediakan bahan baku hasil-hasil pertanian dan bahan baku dari desa setempat dengan menstimulasi permintaan untuk bahan baku pertanian, modal dan barang setengah jadi (pupuk, pompa irigasi, bahan konstruksi) dan dengan menciptakan pasar yang

lebih besar untuk barang-barang konsumsi sederhana yang dapat dikonsumsi di pedesaan. Kabupaten Wonogiri memiliki potensi hasil pertanian, perkebunan, pariwisata, kehutanan juga tambang. Hal ini dapat dihubungkan dengan investor, melalui *event expo* potensi Kabupaten Wonogiri. Hal ini juga harus ditunjang dengan pemberian berbagai insentif dan iklim kondusif bagi para investor, salah satunya dengan kemudahan dan transparansi layanan perijinan dan penanaman modal di wilayah Kabupaten Wonogiri.

Revolusi hijau sebagai strategi pembangunan pedesaan, dapat memiliki beberapa arti penting. *Pertama*, menekankan pembangunan pertanian yang menghargai kelestarian lingkungan hidup dengan tetap menggunakan teknologi terbaru ramah lingkungan. Untuk itu perlu kerjasama dengan pihak akademik (perguruan tinggi) yang kompeten dengan teknologi pertanian dan pemasaran produk pertanian. bahkan saat ini dan yang akan datang, adanya revolusi industri 4.0 mendorong revolusi hijau, dimana revolusi industri 4.0 mengubah konsep industri global, yang pada awalnya fokus pada sumber daya alam, beralih pada inovasi, pemberdayaan ilmu pengetahuan, juga kerjasama. (diunduh dari <http://setnas-asean.id/siaran-pers/read/asean->

Florentina Ratih Wulandari; Hanif Nurcholis
[jepang-korea-dan-china-sepakat-perkuat-](#)
[kampanye-green-jobs](#) Minggu 19 Mei 2019
pukul 01.30 WIB).

Kedua, revolusi hijau mengurangi kerugian pendapatan nasional termasuk pendapatan daerah akibat mengatasi kerusakan lingkungan, baik pada sektor pertanian dan lainnya. Berdasarkan analisis Bank Dunia tahun 2009 diprediksi Indonesia merugi hingga 10% dari PDB-nya per tahun akibat kerusakan lingkungannya. Contohnya, kasus konversi lahan gambut menjadi lahan pertanian telah menyebabkan lebih banyak kebakaran, polusi udara dan kerugian ekonomi yang parah tahun 2014, dimana hanya dalam 3 bulan telah merugikan kurang lebih US\$ 1 miliar untuk mengatasinya. (dari <http://www.worldbank.org/in/news/speech/2015/06/09/the-case-for-inclusive-green-growth> diunduh hari Minggu 19 Mei 2019 pukul 02.30 WIB).

Ketiga, revolusi hijau dalam pembangunan pedesaan dapat mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan hijau. Lingkungan luar Indonesia sudah mulai harus memperhatikan revolusi hijau kembali dalam pembangunan segala sektor. Banyak cerita sukses revolusi hijau, antara lain: negara-negara Asia Timur termasuk Tiongkok, lalu Vietnam, Kamboja dan lainnya yang sudah memelopori strategi revolusi hijau dalam

kebijakan pembangunannya, terutama sektor ekonominya. Negara-negara berkembang fokus pada investasi sektor teknologi bersih (*clean technology*) yang meningkat 19% pertahun dari tahun 2011-2012. Dampak dari revolusi hijau menyelamatkan bisnis teknologi bersih 90% peningkatan pendapatan bahkan saat pertumbuhan ekonomi global menyusut. (disarikan dari <http://www.worldbank.org/in/news/speech/2015/06/09/the-case-for-inclusive-green-growth> diunduh hari Minggu 19 Mei 2019 pukul 02.09 WIB. Tiongkok yang sebelumnya mencapai pertumbuhan pesat ekonominya sampai 2 digit, tetapi merugi 9% *product domestic brutto* (PDB)-nya akibat kerusakan lingkungan. Oleh sebab itu, Tiongkok mulai menerapkan kebijakan dan strategi revolusi hijau, dengan mengutamakan pada inovasi dan produksi yang bernilai tinggi.

Pembangunan pedesaan yang menerapkan revolusi hijau dapat berdampak pada keluaran sistem ekonomi desa (termasuk sistem pengelolaan dana desa) untuk beberapa kepentingan masyarakat desa. Pertama, investasi infrastruktur hijau, semisal pembangunan pembangkit listrik tenaga air (sungai), surya, biogas kotoran hewan (sapi) dan lainnya. Kedua, peningkatan produksi hasil pertanian atau sektor lainnya di pedesaan termasuk pariwisata yang bernilai tambah dan berdaya saing.

Pembangunan hijau (*green development*) yang *booming* saat ini terlebih didorong oleh revolusi industri 4.0, menawarkan peluang bagi perdesaan untuk menjual produk-produk hasil pengolahan budi daya sumber daya alam yang belum tercemar kerusakan atau polusi lingkungan dan tidak berdampak pada kerusakan lingkungan, semisal produk pangan dan olahan hewan organik, eko pariwisata (*eco-tourism*, semisal agrowisatapolitan) dan sebagainya, sehingga bernilai tambah dan berdaya saing tinggi.

Untuk konteks Kabupaten Wonogiri, ide agrowisatapolitan di dataran tinggi Kabupaten Wonogiri juga dapat dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Agrowisatapolitan merupakan aglomerasi kegiatan-kegiatan bernilai tambah (*added value*) yang berbasis pertanian, yang dapat dikembangkan sesuai potensi wilayah dengan hierarki pelayanannya lebih tinggi dari pedesaan karena adanya *urban function center* sehingga dapat menanggulangi dampak negatif pembangunan di desa, serta dapat merefleksikan keterkaitan antarwilayah secara generatif.

Adapun untuk wilayah perdesaan secara umum, dalam konteks strategi revolusi hijau, panen pertanian dan sektor lainnya, dapat dikelola menjadi barang pangan atau hasil

lainnya yang siap jual bernilai tambah dan berdaya saing. Terobosan ini melalui pengemasan dan pemasaran yang memakai paduan teknologi siber dan optik, sebagaimana ciri teknologi informasi era revolusi 4.0, mengingat revolusi industry 4.0 mendukung implementasi revolusi hijau. Oleh sebab itu, pemerintah daerah termasuk desa perlu berkolaborasi dengan beberapa pihak. Kolaborasi tersebut dapat melalui pendekatan *triple helix* (akademik - industri – pemerintah) atau *penta helix* (masyarakat- media – industri-universitas – pemerintah) dalam rangka pembangunan sosial dan ekonomi kawasan perdesaan.

Implikasi strategi revolusi hijau bagi pembangunan desa, dengan pengelolaan dana desa yang tepat akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah perdesaan dan tetap menjaga kelestarian hidup sebagai pembangunan yang berkelanjutan. Dampaknya, dapat mengurangi disparitas antarwilayah perdesaan, mengurangi kemiskinan, mengurangi pengangguran usia produktif dan atau pengangguran tak kentara usia produktif, memberdayakan lansia untuk produktif sehingga mengurangi rasio ketergantungan, dan sebagainya.

Kesimpulan

Kabupaten Wonogiri dan kawasan perdesaan lainnya di Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang beragam, sehingga faktor endogen dan eksogen pembangunan desa, masih belum terdeteksi secara komprehensif. Implikasi kontraproduktif bonus demografi dan belum siapnya kapabilitas sebagian besar penduduk usia produktif memasuki revolusi industri 4.0 menjadi kendala pembangunan desa, baik yang di Kabupaten Wonogiri dan kawasan perdesaan lainnya di Indonesia. Secara umum, strategi revolusi hijau dapat dipertimbangkan serius dalam pembangunan perdesaan secara berkelanjutan di Indonesia, terlebih pada perdesaan yang terdampak kontraproduktif bonus demografi, termasuk Kabupaten Wonogiri.

Rekomendasi Kebijakan

Bagi Pemerintah RI (Pusat dan Daerah), khususnya PemKab Wonogiri perlu mempertimbangkan strategi revolusi hijau yang (Griffin, 1999), sebagai strategi radikal pembangunan sosial ekonomi desa berkelanjutan dalam sistem yang baik (*formidable system*). Sebagai catatan penutup, perlu dipahami oleh semua pemangku kepentingan, akan pemikiran McKinley dalam Boyce et.al (2006:13) yang menyatakan strategi apapun yang ditempuh, keberhasilan suatu strategi pembangunan haruslah ditunjang kebijakan nasional, sistem administrasi dan kelembagaan menyeluruh.

Daftar Pustaka

- BKKBN. 2019. Bonus Demografi meningkatkan Kualitas Penduduk melalui Keluarga pada <https://www.bkkbn.go.id/detailpost/bonus-demografi-meningkatkan-kualitas-penduduk-melalui-keluarga> diunduh pada 28 Februari 2019 pukul 10.52 WIB
- BPS. 2018. Indeks Pembangunan Manusia pada laman <https://www.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html> diunduh Kamis 28 Februari 2019
- BPS. 2018. Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Desember 2018 Edisi 103. Jakarta: BPS.
- BPS Kabupaten Wonogiri, 2018 pada <https://wonogirikab.bps.go.id> diunduh Senin 25 Februari 2019 pukul 08.34 WIB
- Dishub Kabupaten Wonogiri. 2017. “Satu Tahun Pemerintahan Bupati Wonogiri Joko Sutopo”, diunduh dari <http://dishub.wonogirikab.go.id/berita/detail/satu-tahun-pemerintahan-bupati-wonogiri-joko-sutopo>, Kamis 28 Februari 2019 pukul 12.31 WIB
- Griffin, Keith.1999. Alternative Strategy for Economic Development (2nd Ed.). New York: MacMillan Press Ltd (in associated with OECD Development Centre)
- Indrawati, Sri Mulyani.2015. “The Case of Inclusive Green Growth”. *Indonesia Green Infrastructure Summit* 9th Juni 2015 pada <http://www.worldbank.org/in/news/speech/2015/06/09/the-case-for-inclusive-green-growth> diunduh hari Minggu 19 Mei 2019 pukul 02.09 WIB
- Kabupaten Wonogiri. 2019. “Visi dan Misi Kabupaten Wonogiri “ pada http://wonogirikab.go.id/web/kontent/9/visi_misi diunduh hari Kamis 28 Februari 2019 pukul 23.26 WIB

Kemenkeu RI. 2017. Buku Pintar Dana Desa : Dana Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat. (pdf.) Jakarta: Kemenkeu RI.
Kemenperin RI.2019. Industri 4.0 Solusi peningkatan Daya Saing Indonesia pada <http://www.kemenperin.go.id/artikel/17432/Industri-4.0-Solusi-Peningkatan-Daya-Saing-Indonesia>, Kamis, 28 Februari 2019 pukul 17.14 WIB).

Kemendes PDTT RI. 2018. Artikel “Sinergitas Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal”, Sabtu 03 Nopember 2018, pada <https://www.kemendes.go.id/view/detil/2704/-percepatan-pembangunan-daerah-tertinggal> diunduh pada Sabtu 18 Mei 2019 pukul 10.45 WIB

McKinley, Terry. 2006. Economic Policies and Reduction of Poverty in Asia and in Pacific: Alternatives to Neoliberalism, Human Development in the Era Globalization: Essays in the honor of Kieth B. Griffin, James Boyce, et.al (Ed.). UK: Edward Elgar Publishing Limited

Mustopadidjaja, AR. 1996. Strategi Pembangunan Desa dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan pada [http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/20012-\[Konten\]-Konten%202628.pdf](http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/20012-[Konten]-Konten%202628.pdf), disampaikan dalam Acara Wisuda Sarjana S1 Universitas Pawayatan Daha Kediri, 27 Juli, 1996

Neo, Boon Siong, Chen, Geraldine. 2007. Dynamic Governance: Embedding Culture, Capabilities and Change in Singapore.

Sinagore: World Scientific Publishing Co, Pte.Ltd.

NN. 2009. Artikel “Pemprov Perlu Terapkan Reformasi Birokrasi” Kamis 25 Junipada <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-1153740/pemprov-perlu-terapkan-reformasi-birokrasi> diunduh pada Sabtu 18 Mei 2019 pukul 10.32 WIB

Biodata Penulis

Florentina Ratih Wulandari, dosen pada FHSIP UT, lahir di Jakarta 9 Juni 1971, lulus S1 Ilmu Administrasi Negara, Universitas Indonesia, Indonesia pada tahun 1996. Pada tahun 2008 lulus dan meraih gelar Magister Administrasi Publik dari Universitas Indonesia, Depok Indonesia. Saat ini sedang menyelesaikan tugas akhir Program Doktor (S3) pada PDIA Minat Administrasi Publik FIA Universitas Brawijaya, Malang. Riset dan karya ilmiah lebih banyak pada bidang organisasi, administrasi dan kebijakan publik.

Prof. Dr. H. Chanif Nurcholis, M.Si, dosen pada FHSIP UT, lahir 1 Februari 1959 di Demak, Jawa Tengah. Lulus S1 FISIP Universitas Terbuka Program Studi Administrasi Negara tahun 1990, lulus program magister (S2) Ilmu Administrasi Universitas Indonesia tahun 2000 dan lulus program Doktor (S3) Ilmu Pemerintahan di Universitas Padjadjaran Bandung tahun 2010. Terlibat banyak dalam penelitian tingkat nasional dan telah banyak menghasilkan karya ilmiah terkait administrasi pemerintahan desa.